



DJKN



Laporan

KEUANGAN

Tahunan Tahun Anggaran 2024



Jl. Prof. Moh. Yamin No.55,
Tatura Utara, Palu Selatan,
Kota Palu, Central Sulawesi 94111



kpknlpalu@kemenkeu.go.id



(0451) 8202737
0811 - 4560 - 4630 (WA)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 7 Mei 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri
NIP 196803291991031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55 Palu 94117
TELEPON (0451), SUREL: KPKNLPALU@KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 7 Mei 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri
NIP 196803291991031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Tahun Anggaran 2024 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.791.715.268,- atau mencapai 142,40% dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.365.084.000,-

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.913.756.759,- atau mencapai 97,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.992.386.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.798.893.308,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp19.255.128 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.779.638.180 serta Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp32.700.138 dan 42.766.193.170.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.759.611.064 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.062.551.148 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.697.059.916 sedangkan jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp5.645.000, sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp1.702.704.916.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp42.900.240.900,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.702.704.916,- dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp25.587.113,- kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp1.862.339.759) sehingga didapatkan Penurunan Ekuitas sebesar (Rp134.047.730 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp42.766.193.170.-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Angg	2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.365.084.000	4.791.715.268	142	4.945.827.454
JUMLAH PENDAPATAN		3.365.084.000	4.791.715.268	142	4.945.827.454
BELANJA					
Belanja Negara					
Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	0
Belanja Barang	B.3	2.407.308.000	2.328.687.759	96	1.710.823.996
Belanja Modal	B.4	585.078.000	585.069.000	100	661.799.054
Jumlah Belanja Operasi		2.992.386.000	2.913.756.759	97	2.372.623.050
JUMLAH BELANJA		2.992.386.000	2.913.756.759	97	2.372.623.050

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PALU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	26.459.204
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	18.020.787	701.550.286
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	0	0
Persediaan	C.5	1.234.341	16.106.732
Jumlah Aset Lancar		19.255.128	744.116.222
ASET TETAP			
Tanah	C.6	33.222.197.500	33.222.197.500
Peralatan dan Mesin	C.7	4.540.521.549	4.413.909.609
Gedung dan Bangunan	C.8	9.880.225.979	9.548.591.730
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	209.936.000	209.936.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	4.940.000	4.940.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.11	0	265.634.250
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(5.078.182.848)	(4.856.526.542)
Jumlah Aset Tetap		42.779.638.180	42.808.682.547
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.13	267.945.000	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(267.945.000)	0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	0	65.999.999
Jumlah Aset Lainnya		0	65.999.999
JUMLAH ASET		42.798.893.308	43.618.798.768
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	32.700.138	718.557.868
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.17	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.18	0	0
Utang jangka pendek lainnya	C.19	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32.700.138	718,557,868
JUMLAH KEWAJIBAN		32.700.138	718.557.868
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	42.766.193.170	42.900.240.900
JUMLAH EKUITAS		42.766.193.170	42.900.240.900
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.798.893.308	43.618.798.768

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.759.611.064	4.885.681.037
JUMLAH PENDAPATAN		4.759.611.064	4.885.681.037
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	79.048.041	54.359.454
Beban Barang dan Jasa	D.4	978.058.268	1.002.456.982
Beban Pemeliharaan	D.5	491.515.441	220.199.285
Beban Perjalanan Dinas	D.6	792.610.169	453.311.992
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	721.319.229	753.087.089
JUMLAH BEBAN		3.062.551.148	2.483.414.802
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1.697.059.916	2.402.266.235
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		5.645.000	81.778.888
Pendapatan Pelepasan Aset		5.645.000	81.778.888
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	5.645.000	81.778.888
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.702.704.916	2.484.045.123
SURPLUS/DEFISIT LO		1.702.704.916	2.484.045.123

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	42.900.240.900	42.480.731.137
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.702.704.916	2.484.045.123
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	25.587.113	286.287.062
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		25.587.113	286.287.062
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.862.339.759)	(2.350.822.422)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(134.047.730)	419.509.763
EKUITAS AKHIR	E.6	42.766.193.170	42.900.240.900

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Visi DJKN tersebut juga dalam rangka

mendukung visi Kementerian Keuangan dimana DJKN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan itu sendiri.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain arah kebijakan nasional dan Kementerian Keuangan, untuk mendorong tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024. Adapun Arah Kebijakan dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);

- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Lelang.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA 2024 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan web e-rekon-ik yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA 2024 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - d. Pengeluaran untuk ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dikenakan penambahan dana melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 10 (sepuluh) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2024		
	ANGGARAN	ANGGARAN	+/-
	AWAL	SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.365.084.000	3.365.084.000	-
Jumlah Pendapatan	3.365.084.000	3.365.084.000	-
Belanja			
Belanja Barang	2.381.988.000	2.407.308.000	25.320.000
Belanja Modal	582.478.000	585.078.000	2.600.000
Jumlah Belanja	2.964.466.000	2.992.386.000	27.920.000

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu untuk belanja barang sebesar Rp25.320.000 untuk Belanja barang yaitu penambahan Top Down Pagu Rincian Output 4798.FAK.001 Aset BUN yang dikelola sebesar Rp27.920.000,-. Pengurangan Pagu Rincian Output 4701.EBA.002 kerumahtanggaan sebesar Rp2.600.000,- untuk penambahan pagu belanja modal yang merupakan pergeseran dari belanja barang (Rincian Output Kerumahtanggaan) sebesar Rp2.600.000.

Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp4.791.715.268

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.791.715.268. Keseluruhan Pendapatan Negara berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.508.000,00	5.645.000,00	1,61
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	3.500.000,00	1,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.027.453.000,00	2.789.931.975,00	1,38
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.333.958.000,00	1.932.199.258,00	1,45
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	165.000,00	48.790.124,00	295,70
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak	0,00	0,00	1,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	9.513.514,00	1,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0,00	2.135.397,00	1,00
Jumlah	3.365.084.000	4.791.715.268	142,40%

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan	4.791.715.268	4.945.827.454	(154.112.186)	-3,12%
JUMLAH	4.791.715.268	4.945.827.454	(154.112.186)	-3,12%

Realisasi Belanja
Rp2.913.756.759

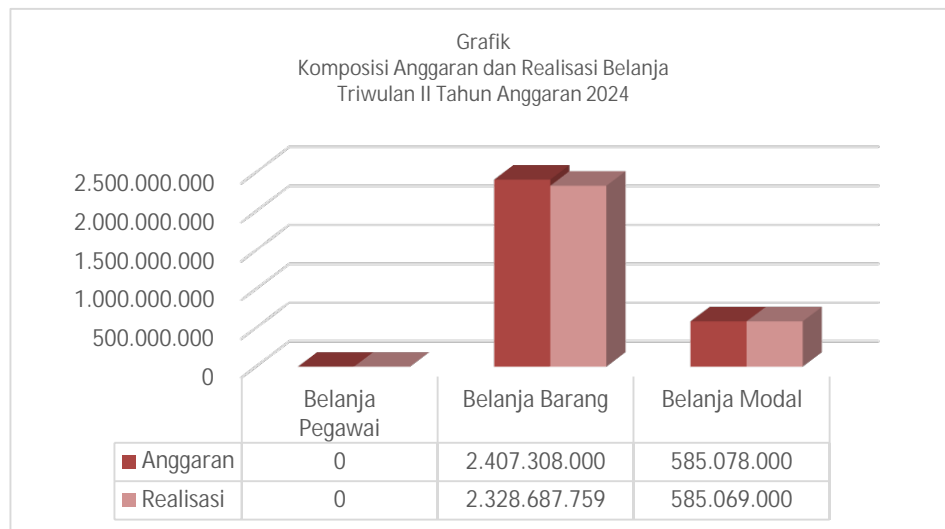
Belanja

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.913.756.759 atau sebesar 97,37% dari anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp2.992.386.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 September 2024

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0,00%
52	Belanja Barang	2.407.308.000	2.328.687.759	96,73%
53	Belanja Modal	585.078.000	585.069.000	100,00%
Jumlah		2.992.386.000	2.913.756.759	97,37%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp541.133.709 atau sebesar 22,81% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Perbandingan Realisasi Belanja 2024 dan 2023

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	REALISASI		NAIK/(TURUN)	
		2024	2023	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00%
52	Belanja Barang	2.328.687.759	1.710.823.996	617.863.763	36,11%
53	Belanja Modal	585.069.000	661.799.054	-76.730.054	-11,59%
Jumlah		2.913.756.759	2.372.623.050	541.133.709	22,81%

Belanja Pegawai
Rp0

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dilaksanakan Uji Coba (*Piloting*) Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran atas Gaji (beserta tunjangan yang melekat), Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur.

Sejak bulan Oktober 2020 pengelolaan belanja pegawai pada KPKNL Palu sudah tersentralisasi oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2024 dan 2023 sudah tidak ada anggaran belanja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0
Belanja Tunj.Fungsional PNS	0	0
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0
Realisasi Belanja Netto	0	0

Belanja Barang
Rp2.328.687.759

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.328.687.759 dan Rp1.710.823.996. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp617.863.763 atau 36,11% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK/(TURUN)	
			Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	652.107.318	584.092.420	68.014.898	11,64%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.470.368	5.232.930	1.237.438	0,00%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.361.800	19.524.779	-6.162.979	-31,56%
Belanja Honor Operasional Satker	51.896.000	136.200.000	-84.304.000	-61,90%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	1.050.000	-1.050.000	-100,00%
Belanja Bahan	60.526.970	21.470.200	39.056.770	181,91%
Belanja Barang Operasional Lainnya	-	34.244.880	-34.244.880	100,00%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.026.500	15.530.000	496.500	3,20%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	64.175.650	49.306.500	14.869.150	30,16%
Belanja Langganan Listrik	161.522.666	153.819.710	7.702.956	5,01%
Belanja Langganan Telepon	16.974.877	16.841.300	133.577	0,79%
Belanja Sewa	1.500.000			
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0	0,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	281.906.206	86.892.799	195.013.407	224,43%
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	209.609.235	133.306.486	76.302.749	57,24%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	697.366.259	380.613.992	316.752.267	83,22%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.354.000	73.440.000	21.914.000	29,84%
Realisasi Belanja Bruto	2.328.797.849	1.711.565.996	617.231.853	36,06%
<i>Pengembalian Belanja</i>	110.090	742.000	-631.910	

Belanja Modal
Rp585.069.000

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp585.069.000 sedangkan periode 31 Desember 2023 realisasi Belanja Modal sebesar Rp661.799.054. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp68.168.946 atau 91,00%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	585.069.000	330.164.805	77,21%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	331.634.249	-100,00%
Jumlah Belanja	585.069.000	661.799.054	-11,59%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp0 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.459.204.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan pajak.

*Kas lainnya dan
setara kas
Rp18.020.787*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.020.787 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp701.550.286

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima
Rp0*

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 Rp0 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara.

Persediaan
Rp1.234.341

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.234.341 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.106.732.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	1.234.341	16.106.732
Jumlah	1.234.341	16.106.732

Tanah
Rp33.222.197.500

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.222.197.500 dan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp33.222.197.500. Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

Klasifikasi	NUP	Luas	Lokasi	Nilai
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3530 m2	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 , Palu	19.011.571.000
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	814 m2	Jl. D.I Panjaitan, Palu	2.153.844.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	4029 m2	Jl. S. Parman, Palu	12.056.782.500
Jumlah				33.222.197.500

Peralatan dan Mesin
Rp4.540.521.549

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.540.521.549 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp4.413.909.609. Terdapat mutasi bertambah pada peralatan dan mesin sejumlah Rp602.919.000 pada barang sebagai berikut antara lain: Station Wagon 1 unit sebesar Rp406.410.000, A.C Split (8 Unit) sebesar Rp78.960.000, Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) (3 Unit) sebesar Rp59.700.000, Mic Conference (1 Unit) sebesar Rp11.500.000, Microphone/Wireless MIC (1 Unit) sebesar Rp1.500.000, Kamera Digital (1 Unit) Rp26.999.000, Lap Top (3 Unit) sebesar Rp17.850.000. Kemudian terdapat mutasi berkurang sebesar Rp476.307.060,- yang berasal dari penghentian penggunaan asset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Palu

Gedung dan
Bangunan
Rp9.880.225.979

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.880.225.979 dan Rp9.548.591.730. Mutasi bertambah sebesar Rp331.634.249 yang berasal dari penyelesaian Konstruksi Dalam Pekerjaan dan mutasi berkurang sebesar Rp0.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo 31 Desember 2024
		Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Kantor	6.044.270.730	-		6.044.270.730
Bangunan Gudang	463.478.000			463.478.000
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	6.865.000			6.865.000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	218.534.000			218.534.000
Bangunan Parkir Lainnya	95.857.000	-		95.857.000
Taman	134.364.000			134.364.000
Rumah Negara Golongan I	248.510.000			248.510.000
Rumah Negara Golongan II	1.137.675.000	331.634.249		1.469.309.249
Pagar	1.199.038.000			1.199.038.000
Jumlah	9.548.591.730	331.634.249	-	9.880.225.979

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp209.936.000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp209.936.000 dan Rp209.936.000. Mutasi tambah dan berkurang sebesar Rp0.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Gedung dan Bangunan	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo 31 Desember 2024
		Bertambah	Berkurang	
Jalan dan Jembatan	209.936.000	-	-	209.936.000
Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	209.936.000	-	-	209.936.000

Aset Tetap Lainnya
Rp4.940.000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu yaitu berupa Buku Lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.940.000. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp265.634.250. Terdapat Mutasi berkurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp265.634.250 dikarenakan pada tahun 2024 KPKNL Palu sudah menyelesaikan belanja modal berupa Renovasi Rumah Negara yang pada tanggal 10 Februari 2024.

Gedung dan Bangunan	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo 31 Desember 2024
		Bertambah	Berkurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	265.634.250	-	265.634.250	-
Jumlah	265.634.250	-	265.634.250	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp5.078.182.848)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp5.078.182.848 dan (Rp4.856.526.542).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	3.515.582.770	3.517.806.881
Gedung dan Bangunan	1.405.148.078	1.202.261.261
Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.452.000	136.458.400
JUMLAH	5.078.182.848	4.856.526.542

Aset Lainnya
Rp267.945.000

C.13 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp267.945.000 dan Rp0. Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
i Aset Lainnya
Rp267.945.000

C.14 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp267.945.000) dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Akumulasi
Dana yang Dibatasi
Penggunaanya
Rp0

C.15 Dana yang Dibatasi Penggunaanya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp65.999.999. Dana yang Dibatasi Penggunaanya termasuk dalam Aset Lainnya yang tercatat dalam neraca.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp32.700.138

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.700.138 dan Rp718.557.868. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0

C.17 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp40.000.000

C.18 Uang Muka dari KPPN

Penarikan dan pengembalian dana UP/TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP /TUP oleh Satker (SP2D) UP / TUP dicatat oleh Kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUN juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN). Dengan demikian nilai Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sejumlah kas di bendahara pengeluaran pada periode yang sama yaitu Rp0 dan Rp0.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.19 Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas
Rp42.766.193.170

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 42.766.193.170 dan Rp 42.900.240.900. Ekuitas adalah Kekayaan Bersih Entitas yang merupakan Selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp4.759.611.064*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.759.611.064 dan Rp4.885.681.037. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	0	0	-	0,00%
2	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesn	-	-		
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)	-	-	-	0,00%
4	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (425782)	2.776.281.255	1.496.431.793	1.279.849.462	85,53%
5	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)	1.932.199.258	2.914.319.846	(982.120.588)	-33,70%
6	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)	35.981.640	472.546.730	(436.565.090)	-92,39%
7	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak (425995)	-	1.460	(1.460)	0,00%
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.513.514	-	9.513.514	
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)	2.135.397	845.499	1.288.899	100,00%
10	Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	3.500.000	1.535.709	1.965.290	0,00%
	Jumlah	4.759.611.064	4.885.681.037	(126.069.973)	-2,58%

*.Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada bulan Oktober 2020, Belanja

Pegawai sudah diberlakukan sentralisasi yang menjadi tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun anggaran 2021 sudah tidak ada anggaran untuk belanja Pegawai di KPKNL Palu. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
			(Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-	0,00%
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	0,00%
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	0,00%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	0,00%
Pengembalian Belanja Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-	0,00%
Beban Uang Makan PNS	-	-	-	0,00%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	-	0,00%
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	0,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-	0,00%
Beban Uang Lembur	-	-	-	0,00%
Jumlah	-	-	-	0,00%

Beban Persediaan
Rp79.048.041

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp79.048.041 dan Rp54.359.454. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	79.048.041	54.359.454	24.688.587	45,42%
Jumlah Beban Persediaan	79.048.041	54.359.454	24.688.587	45,42%

Beban Barang dan
Jasa
Rp978.058.268

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp978.058.268 dan Rp1.002.456.982. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	652.107.318	584.482.420	67.624.898	11,57%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.470.368	5.232.930	1.237.438	0,00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.946.800	17.463.460	(3.516.660)	-20,14%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.896.000	136.200.000	(84.304.000)	-61,90%
Beban Barang Operasional Lainnya	-	34.244.880	(34.244.880)	100,00%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.050.000	(1.050.000)	-100,00%
Beban Bahan	60.526.970	21.470.200	39.056.770	181,91%
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-	0,00%
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	0,00%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	16.026.500	15.530.000	496.500	3,20%
Beban Langganan Telepon	16.852.275	18.266.043	(1.413.768)	-7,74%
Beban Langganan Listrik	158.732.037	168.517.049	(9.785.012)	-5,81%
Beban Sewa	1.500.000	-	1.500.000	0,00%
Belanja Modal BLU	-	-	-	0,00%
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	0,00%
Jumlah	978.058.268	1.002.456.982	(24.398.714)	-2,43%

Beban

Pemeliharaan

Rp491.515.441

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp491.515.441 dan Rp220.199.285. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209.609.235	133.306.486	76.302.749	57,2%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	281.906.206	86.892.799	195.013.407	224,4%
Jumlah	491.515.441	220.199.285	271.316.156,00	123,2%

Beban Perjalanan

Dinas

Rp792.610.169

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp792.610.169 dan Rp453.331.992. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	697.256.169	379.511.992	317.744.177	83,7%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.354.000	73.800.000	21.554.000	29,2%
Jumlah	792.610.169	453.311.992	339.298.177	74,8%

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp721.319.229

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp721.319.229 dan Rp753.087.089. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk

Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	471.851.699	496.099.635	- 24.247.936	-4,9%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228.473.930	235.993.854	- 7.519.924	-3,2%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.993.600	20.993.600	-	0,0%
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	0,0%
Jumlah Penyusutan	721.319.229	753.087.089	- 31.767.860	-4,2%
Amortisasi	721.319.229	753.087.089	- 31.767.860	-4,2%

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.645.000 dan Rp81.778.000. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	30 September 2024	30 September 2023	NAIK (TURUN) %	
			(Rp)	%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,0%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.645.000	81.778.888	- 76.133.888	0,0%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.645.000	81.778.888	- 76.133.888	-93,1%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp42.900.240.900

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.900.240.900 dan Rp42.480.731.137.

Surplus/(Defisit) LO
Rp1.702.704.916

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.702.704.916 dan Rp2.484.045.123, Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih atau kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi /
Kesalahan
Mendasar
Rp -

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp25.587.113

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.587.113 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp286.287.062.

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp -

Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp25.587.113*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.587.113 dan sebesar Rp256.287.062.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.862.339.759*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp1.862.339.759) dan (Rp2.350.822.422).

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1.862.339.759)	(2.350,822,422)	1.283,704,242	(92.52)

*Ekuitas Akhir
Rp43.079.309.098*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.766.193.170 dan Rp42.900.240.900.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu melakukan revisi melalui mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik yang merubah Pagu Anggaran maupun yang tidak merubah Pagu (pergeseran) . Revisi dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 1/PB/2022 Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2024.

Revisi pertama, ketiga, kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh DIPA pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kewenangan Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah yaitu Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Sedangkan Revisi kedua Kewenangan Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah berupa penambahan volume keluaran pada RO peralatan fasilitas perkantoran, sedangkan revisi Keempat dan ketujuh DIPA pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Penambahan Pagu Anggaran untuk RO Aset Bun dan Optimalisasi Belanja Modal serta pemindahan PAGU antar kegiatan dan Revisi kedelapan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.

Jumlah porsi penyesuaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu TA 2024 setelah dilakukan revisi sebesar:

Uraian	2024		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	+/-
Belanja			
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	2.381.988.000	2.407.308.000	25.320.000
Belanja Modal	582.478.000	585.078.000	2.600.000
Jumlah Belanja	2.964.466.000	2.992.386.000	27.920.000